



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMOYO WIDODO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 212737

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.494.254.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/105 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 418.740.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 348.582.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/143 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 293.865.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/45 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 433.067.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 252.800.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 42.451.610****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	91.876.128
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.881.381.738
III. HUTANG	Rp.	96.480.920
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.784.900.818

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.